

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Dalam beberapa tahun terakhir, strategi Italia yang ditujukan untuk menurunkan migrasi selalu berpusat pada pendekatan yang melibatkan operasi maritim dengan militerisme, dikombinasikan dengan kriminalisasi terhadap kelompok sipil, dan kemitraan dengan negara asing. Metode terakhir juga melibatkan eksternalisasi kontrol perbatasan melalui beberapa perjanjian yang dilakukan antara negara tujuan yaitu, Italia dan negara asal atau transit yaitu, Libya. MOU Italia-Libya memiliki pengaruh yang kompleks terhadap hubungan kedua negara, isu migrasi, dan hak asasi manusia. Dalam konteks politik Internasional, perjanjian ini mencerminkan upaya kerjasama antara Italia dan Libya dalam mengatasi isu migrasi yang kompleks. Namun, perjanjian ini juga mengungkapkan upaya eksternalisasi kontrol perbatasan oleh Italia dengan bekerja sama dengan Libya, dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia para imigran dan pengungsi. Dalam konteks Teori Hak Asasi Manusia, perjanjian ini menimbulkan berbagai permasalahan terkait hak asasi manusia. Italia gagal memastikan perlindungan terhadap hak untuk hidup dan keselamatan para imigran dan pengungsi yang berusaha menyeberangi Laut Mediterania.

Selain itu, Italia bersama dengan Libya melanggar prinsip Non-refoulement dengan mengembalikan para pengungsi ke wilayah di mana hidup dan kebebasan mereka terancam. Penolakan untuk memproses status para imigran juga dapat menjadi bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks Konsep

Perjanjian Internasional, MOU Italia-Libya menunjukkan upaya kerjasama untuk mengurangi jumlah imigran yang datang ke Italia. Namun, upaya kontrol perbatasan ini tidak efektif dalam mengurangi keinginan imigran untuk datang ke Italia, dan hanya sebatas solusi jangka pendek untuk merepratiasi imigran di laut mediterania. Permasalahan migrasi tidak dapat sepenuhnya diatasi karena berbagai faktor pendorong imigrasi yang berasal dari masalah sosio-ekonomi di negara asal para imigran.

Dalam prosesnya, kerjasama ini menciptakan dinamika baru dalam hubungan politik dan ekonomi antara Italia dan Libya, namun juga menghadirkan risiko pelanggaran hak asasi manusia dan ketergantungan bagi Libya. Italia perlu mempertimbangkan kembali implikasi dari perjanjian ini dan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Italia.

Selain itu, untuk mengatasi isu migrasi secara lebih efektif, Italia dan negara-negara lain di Uni Eropa perlu berkolaborasi dengan negara-negara asal dan transit imigran untuk mengatasi akar masalah sosio-ekonomi dan politik yang mendorong hadirnya kegiatan migrasi. Pendekatan yang holistik dan berbasis hak asasi manusia harus menjadi landasan dalam penanganan isu migrasi demi menciptakan kondisi yang lebih adil dan berwawasan kemanusiaan bagi para imigran dan pengungsi.

Perlu juga dicatat studi lebih lanjut harus dilakukan apakah pendekatan ekonomi tertentu harus dilakukan oleh negara tujuan di negara asal atau negara transit, karena studi ini menunjukkan bahwa faktor utama penyebab migrasi adalah faktor

sosio ekonomi dan kesejahteraan, dan segala pendekatan yang dilakukan melalui hukum internasional dengan merubah aturan tidak akan menciptakan solusi permanen baik untuk imigran atau bahkan Italia.

